

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Amu. (2016, September 28). *Saat Terutang & Tata Cara Pemungutan*. Diambil kembali dari news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/saat-terutang--tata-cara-pemungutan-8051#:~:text=Pemungutan%20Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2022%20atas%20impor%20barang%20dilaksanakan%20dengan,yang%20ditunjuk%20oleh%20Menteri%20Keuangan>.
- Bayu. (2021, Juni 07). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22*. Diambil kembali dari konsultanku.co.id: <https://konsultanku.co.id/blog/panduan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-pasal-22>
- Direktur Jenderal Pajak. (2009). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
- Fitriya. (2022, April 1). *Panduan Lengkap PPh 22 Bendaharawan dan Umum*. Diambil kembali dari <https://klikpajak.id/>: <https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-22-dan-lapor-spt-pph-22/>
- Harian Merapi. (2021, Oktober 19). *Duit PPh21 yang 'Ditilep' Eks Bendahara*. Diambil kembali dari harianmerapi.com: <https://www.harianmerapi.com/news/pr-401503807/duit-pph21-yang-ditilep-eks-bendahara-pemkot-salatiga-sebesar-rp12-569-miliar>
- Herawati, K. R. . (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 472.
- Hilmy, F. D. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Belanja Barang oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- iNewsJateng. (2021, Juli 26). *Kasus Dugaan Penggelapan PPh21, Kejari Salatiga*. Diambil kembali dari iNewsJateng.id.

- Judisseno, R. K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Kementerian Keuangan. (2021). *Data APBN*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn2021>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371-378.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Poerwadarminta, W. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradana, A. P. (2021). *Tinjauan atas Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*.

- Setiawan, B., & Fitrandi. (2017). *Kupas Tuntas PPh POTPUT Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utari, K. S. (2016). Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Guna Menentukan Pajak Terutang. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, 39.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wijaya, D. I. (2018, September 12). *Memahami Tugas dan Fungsi Bendahara Pengeluaran Sebagai Kunci Sentral Pengelolaan APBN*. Diambil kembali dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mataram/id/data-publikasi/berita-terbaru/2826-memahami-tugas-dan-fungsi-bendahara-pengeluaran-sebagai-kunci-sentral-pengelolaan-apbn.html>
- ZF, A. (2020, Maret 9). *Mengetahui Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran SPT Masa*. Diambil kembali dari <https://flaztax.com/https://flaztax.com/2020/03/09/mengetahui-batas-waktu-pelaporan-dan-pembayaran-spt-masa/>